

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang berjalan berdasarkan prinsip syariah. Maka dalam penilaian kinerja BUS seharusnya ditinjau dari segi kepatuhan dalam penerapan prinsip-prinsipnya, baik dari segi keuangan, sosial, tata kelola dan aspek lainnya.

Dari segi keuangan, tren kinerja BUS di Indonesia menunjukkan performa yang positif sejak tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2014, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ditunjukkan dengan penurunan ekspor sehingga neraca perdagangan Indonesia defisit, inflasi yang tinggi, serta melemahnya nilai rupiah yang berimbas pada perbankan.

Performa positif di BUS ditunjukkan dengan peningkatan laba bersih. Dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS), tercatat peningkatan laba bersih sebesar 39% (OJK, 2017, hlm.10) hingga Rp.7.197.000.000. Sedangkan diukur menggunakan rasio keuangan, terjadi peningkatan rasio ROA (*Return on Asset*) sebesar 40% pada tahun 2017 (OJK, 2017, hlm. 4). Pengukuran kinerja menggunakan rasio ROA telah dilakukan oleh banyak peneliti seperti Pujianti (2016), Azis (2016) dan Suroso, *et al* (2017).

Dari segi pembiayaan, NPF (*Net Performing Financing*) yang merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah berdasarkan kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Muhammad, 2009, hlm. 263). NPF di BUS dalam SPS mengalami penurunan, dari 3,38% di tahun 2014, 3,19% di tahun 2015 dan mencapai 2,17% di tahun 2016, namun mengalami kenaikan sebesar 0,41% menjadi 2,58% di tahun 2017 (OJK, 2017, hlm. 2). Jika melihat NPF *gross* di beberapa bank syariah, seperti Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) tercatat kenaikan sebesar 4,13% dari 17,91% menjadi 22,04% di tahun 2017. Oleh karenanya berimbas pada peningkatan pencadangan penyisihan aktiva produktif (PPAP) dari Rp.698.211.130.000 menjadi

Rp.104.464.380.000. Artinya terjadi kenaikan pencadangan sebesar 49,62%. Namun berbeda dengan Maybank Syariah yang berhasil menurunkan rasio NPF hingga 0% karena peningkatan budaya pengelolaan risiko yang efektif.

Selain pengukuran kinerja menggunakan rasio keuangan konvensional, pengukuran kinerja terhadap kepatuhan dan kepedulian sosial menjadi hal yang penting di lembaga keuangan islam terutama perbankan syariah, karena sebagai pelaku ekonomi harus didasarkan pada prespektif *khalifatullah fil ardh* yang berperan sebagai wakil Allah untuk mengelola alam dan sosial dengan tujuan memberi kesejahteraan (Triyuwono, dkk, 2016, hlm. 112). Untuk mengukur kinerjanya, dapat menggunakan *Islamicity Performance Index* (IPI), yang bersumber dari laporan keuangan publikasi.

IPI merupakan salah satu alternatif pengukuran kinerja islami untuk bank syariah berdasarkan *islamicity indices* yang dibuat oleh Hameed, *et al* (2004). IPI memberikan kesimpulan bagaimana kinerja bank pada tahun sebelumnya dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan syariah (Hameed *et al*, 2004, hlm.5).

Pengukuran IPI di perbankan syariah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan dan sosial yang terdiri dari *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment versus non-islamic investment ratio*, *islamic income versus non islamic income*, dan *AAOFI index* (Hameed *et al*, 2004, hlm.18). Rasio-rasio tersebut merupakan perpaduan perhitungan kinerja keuangan dengan kinerja sosial, karena dalam CSR syariah terdapat unsur investasi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), sistem *qardhul hasan* dan sistem bagi hasil. (Suharto, 2010, hlm. 104)

Pengukuran ini dinilai lebih cocok untuk perbankan syariah, karena selama ini penelitian masih terfokus pada pengukuran kinerja keuangan dengan alat ukur analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*), dan lain sebagainya (Antonio *et al*, 2012, hlm. 13). Kekurangan dari pengukuran-pengukuran tersebut yaitu hanya mengukur nilai materialnya saja (Aisjah dan Hadianto, 2013, hlm. 100), sedangkan yang dibutuhkan adalah pengungkapan nilai spiritual dan nilai

sosial yang terkandung dalam perbankan syariah. Sehingga, Harianto dan Syarifuddin (2013), Aisjah dan Hadianto (2013) serta Meilani (2015) menggunakan IPI dalam pengukuran kinerjanya.

Salah satu rasio IPI yaitu rasio bagi hasil atau *profit sharing ratio* (PSR) menunjukkan bagaimana kesuksesan bank syariah dalam mencapai tujuannya dan menunjukkan eksistensinya (Hameed *et al*, 2004, hlm.18), karena larangan riba, maka bagi hasil dilakukan pada produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang mengusung kebersamaan dan keadilan sebagai nilai spritualnya. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil di BUS dan UUS terus menunjukkan peningkatan, namun masih tergolong lebih rendah daripada pembiayaan yang menggunakan akad jual beli (*murabahah* dan *istishna'*), ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Peningkatan *Profit Sharing* di BUS

Th.	Pembiayaan Bagi Hasil	Piutang (akad jual beli)	Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan
2014	64.578.000.000	123.977.000.000	199.330.000.000	32%
2015	76.515.000.000	126.839.000.000	212.996.000.000	36%
2016	94.752.000.000	145.184.000.000	248.007.000.000	38%
2017	119.690.000.000	157.927.000.000	285.695.000.000	42%

Sumber : SPS OJK (2017, hlm 9) data diolah

Begitupula dari rasio IPI yang lain, yaitu *zakat performance ratio* (ZPR) masih dinilai rendah. Berdasarkan penelitian Wiyadi, dkk (2016, hlm. 10) BUS di Indonesia menghasilkan kinerja syariah tertinggi dibanding dengan negara lain se-ASEAN, tetapi rasio kinerja zakat masih rendah. Penelitian Aisjah dan Hadianto (2013) menghasilkan rasio kinerja zakat (sebagai rasio *charity*) di BUS yaitu BMI

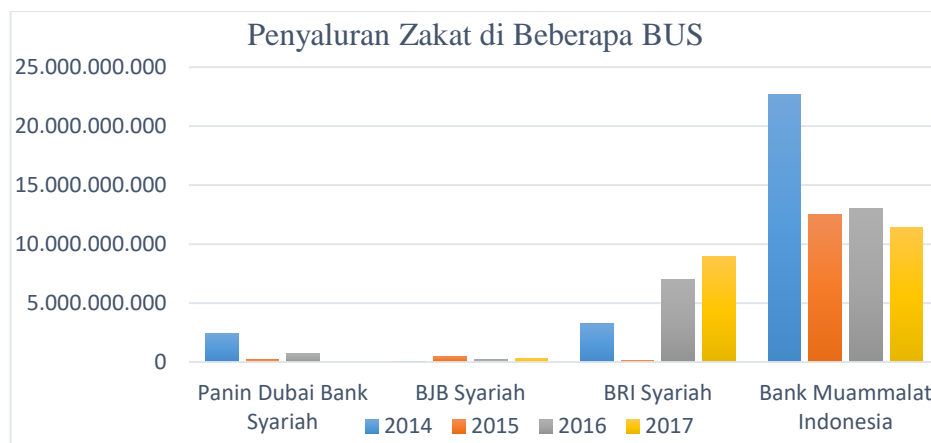
Tsara Azizah, 2019

GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DI BANK UMUM SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan BSM tidak memuaskan dengan perolehan skor 1 dari 5. Rendahnya ZPR disebabkan adanya penurunan pembayaran zakat. Peningkatan laba di BUS, tidak disertai dengan peningkatan dalam membayar zakat sehingga ada kinerja IPI yang harus diperbaiki.

Terjadi fluktuasi dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh BUS di 3 tahun terakhir. Zakat adalah salah satu implementasi dari prinsip yang dijalankan oleh BUS. Panin Dubai Bank Syariah dan BJB Syariah yang terus mengalami penurunan sejak 2014-2017, sedangkan BRI Syariah dan Bank Muammalat Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2016, dan turun kembali di tahun 2017. Fluktuasi dalam penyaluran zakat, disajikan dalam bentuk grafik berikut:



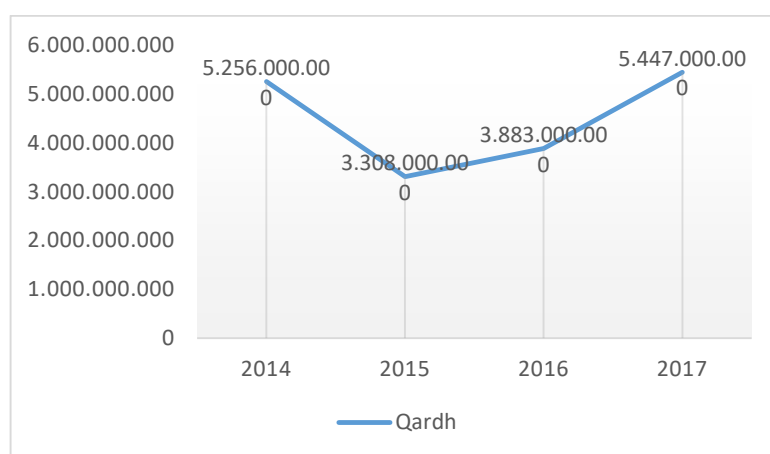
Gambar 1.1 Penyaluran Zakat di beberapa BUS tahun 2014-2017

Sumber : *Annual Report* masing-masing BUS (data diolah)

Adapun rasio IPI untuk melihat keadilan di BUS yaitu *Equitable Distribution Ratio* (EDR) telah dialokasikan pada yang berhak, seperti dalam penelitian Listiani dkk (2016) serta Aisjah dan Hardianto (2013). Pendistribusian pendapatan masih berfokus pada perusahaan, walaupun telah mengalokasikan pada yang berhak seperti masyarakat dan karyawan. Bahkan untuk Bank Muammalat Indonesia (BMI) dan Bank syariah Mandiri (BSM) mendapatkan skor 4 dari 5, yang hasilnya memuaskan.

Pengalokasian terhadap yang berhak tercermin pada pembiayaan berdasarkan akad *qardh* yang merupakan misi sosial, karena pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* didefinisikan sebagai pinjaman dana tanpa imbalan yang memungkinkan

peminjam untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati tanpa memberikan kelebihan, dimana tidak mengharapkan keuntungan melainkan kebermanfaatannya karena pengembalian sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa jaminan terutama bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana dalam keadaan terdesak untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha kecil. Walaupun demikian, dalam SPS OJK tercatat jika penyaluran *qardh* masih fluktuatif, terjadi penurunan di tahun 2015 dan 2016, namun meningkat kembali di tahun 2017 yang terlihat dalam grafik berikut:



Gambar 1.2 Penyaluran *Qardh* di BUS tahun 2014-2017

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah* (OJK, 2017, hlm. 11)

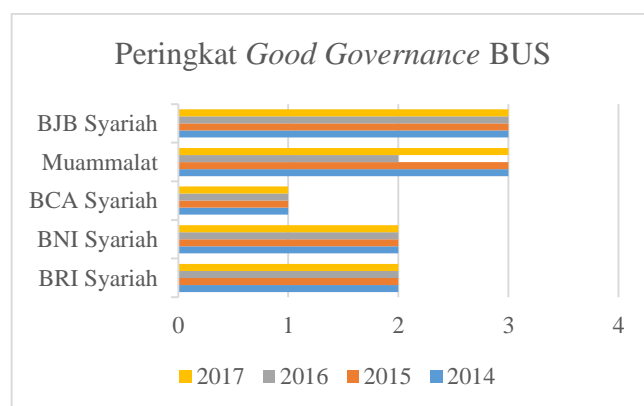
Selain itu, pendapatan islami bank syariah di Indonesia, seperti BSM dan BMI mencapai 99% dari total pendapatan (Aisjah dan Hardianto, 2013, hlm. 105). Maka, berdasarkan pemaparan sebelumnya, secara keseluruhan *islamic performance* di BUS meningkat, walaupun masih terdapat penurunan dalam hal-hal tertentu, seperti zakat. Prinsip keadilan dan keseimbangan yang terdapat dalam konsep IPI di perbankan syariah sesuai dengan *shari'ah enterprise theory* (SET). Dalam SET, keseimbangan ditunjukkan dengan metafora zakat, dan mementingkan semua *stakeholder* yaitu Tuhan, manusia dan lingkungan untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. (Triyuwono, 2012, hlm. 412)

Untuk meningkatkan kinerja BUS, diperlukannya sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang menjaga aktivitas perbankan tetap patuh pada prinsip syariah. Karena OJK mengemukakan perlunya optimalisasi koordinasi

dengan para pemangku kepentingan yang masih menjadi catatan perbaikan kedepannya bagi bank syariah (Eksekutif OJK, 2017, hlm.v). Selain itu, “...mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko yang sesuai dengan *best practice*” menjadi poin *master plan* OJK dalam penguatan dan penataan SJK sesuai standar *internasional* agar stabil (OJK, 2016, hlm. 52).

Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. *Stakeholder* di lembaga keuangan islam harus mengacu pada SET yang mencakup Tuhan yaitu Allah, manusia dan alam (Triyuwono, 2012, hlm. 412). *Corporate governance* di perbankan syariah yang dikenal dengan *sharia governance* memiliki ciri khas, yaitu adanya *sharia compliance* (kepatuhan terhadap prinsip syariah) yang diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS).

Sharia governance di perbankan syariah Indonesia menggunakan *self assessment* dalam menilai tata kelolanya, sehingga dapat diketahui peringkat dari pelaksanaan tata kelolanya. Peringkat “1” menandakan sangat baik, “2” baik, “3” cukup baik, “4” kurang baik, dan “5” tidak baik. Tren pelaksanaan tata kelola di BUS masuk dalam kategori baik, dengan mayoritas mendapatkan peringkat “2”, dan lebih menggembarakan terdapat BUS yang mendapatkan peringkat “1”, yaitu BCA Syariah. Maka penerapan *sharia governance* di bank syariah telah baik. Sedangkan Bank Muammalat Indonesia dan BJB Syariah masih melakukan perbaikan dalam tata kelolanya, terutama dalam penyelesaian proses hukum. BJBS berupaya meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran pembiayaan pasca realisasi. Tren *good governance* beberapa BUS 3 tahun terakhir disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Tsara Azizah, 2019

GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DI BANK UMUM SYARIAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.3 Hasil *self assessment* di beberapa BUS tahun 2014-2017

Sumber : *Annual Report* masing-masing BUS (data diolah)

Penelitian mengenai *corporate governance* mempengaruhi kinerja keuangan karena meningkatkan nilai perusahaan dan kinerjanya telah dilakukan beberapa peneliti, seperti penelitian Black, *et al* (2005), Black and Khanna (2007). Sedangkan penelitian mengenai *corporate governance* di lembaga keuangan islam seperti bank syariah dan kinerja keuangan diteliti oleh Asrori (2014), Meilani (2015), Pratiwi (2016), Suroso *et al* (2017) dan Siswanti *et al* (2017) yang menunjukkan pengaruh positif. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *sharia governance* dengan kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian Syafei (2013) menunjukkan bahwa penerapan *sharia governance* dengan indikator *good governance* bisnis syariah (GGBS) tidak berpengaruh terhadap pencapaian laba yang dihasilkan oleh emiten yang terdaftar di dalam JII. Tetapi, jika objeknya sektor perbankan syariah, kontribusi penerapan *sharia governance* dengan indikator GGBS terhadap rasio IPI meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia sebesar 26,01% (Meilani, 2015).

Disamping itu, bank syariah memiliki tantangan yang harus dihadapi, yaitu pergeseran strategi bisnis. Bisnis berbasis tenaga kerja (*labor based business*) bergeser menjadi bisnis berbasis pengetahuan (*knowledge-based business*) dimana teknologi, inovasi yang mempercepat segala aktivitas membuat dunia bisnis semakin kompetitif Siswanti *et al* (2017, hlm. 317). Ini yang menyebabkan perusahaan meningkatkan perhatiannya pada *intellectual capital*, karena permasalahan bank syariah yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya akses akan produk keuangan syariah (Eksekutif OJK, 2017, hlm.v). Karena poin “...mengembangkan kualitas pelaku SJK syariah” menjadi *master plan* OJK untuk sektor jasa keuangan Indonesia 2015 – 2019 (OJK, 2016, hlm. 52). Maka, dengan mengikuti perkembangan *knowledge based business*, yaitu memaksimalkan *intellectual capital* akan mempengaruhi kinerja perbankan baik keuangan maupun sosialnya.

Intellectual capital berakar dari *resource based theory* (RBT), perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang didapat dari memanfaatkan dan

mengelola sumber daya dengan baik sehingga menghasilkan *value added* dan kinerja yang optimal. Sumber daya perbankan yang terbesar yaitu *intellectual capital*, yang terdiri dari *human capital*, *structure capital* dan *customer capital*. Sayangnya, pengungkapan IC dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara penyusun dan pengguna laporan (Kartikasari dan Syafruddin, 2015, hlm. 2), karena informasi IC sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya oleh investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Peningkatan kinerja keuangan disebabkan oleh IC telah diteliti oleh Chen, *et al* (2005), Baroroh (2013) dan Ulum (2013, hlm.11) yang menganalisis hubungan IC dan kinerja perusahaan di Indonesia yang terdaftar dan tidak terdaftar di BEI, hasil pengujiannya yaitu terdapat pengaruh VAICTM terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa kini maupun masa yang akan datang. Begitupula di sektor perbankan syariah, IC berpengaruh terhadap kinerja keuangan, seperti penelitian Suroso *et al* (2017) dan Siswanti *et al* (2017). Walaupun hasilnya diketahui jika *human capital* masih dinilai rendah karena tidak ditunjang dengan *emotional capital*, *social capital*, *fortitude capital*, *moral capital* dan *health capital* (Suroso *et al*, 2017, hlm. 100). Dibuktikan dengan adanya penyelewengan prosedur yang mengakibatkan kerugian, salah satunya pembiayaan macet. Dilansir dalam *CNN Indonesia* terjadi pembiayaan macet sebesar Rp. 548.940.000.000 yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) atas pemberikan pembiayaan kepada PT. Hastuka Sarana Karya (HSK) periode 2014 hingga 2016 tanpa jaminan. Hingga kini kasus ini masih dalam proses penyidikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, mengacu pada SET yang menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka entitas berkewajiban patuh terhadap prinsip syariah dimana harus menjaga keadilan dan mensejahterakan semua *stakeholder* yang tercermin dalam indeks rasio kinerja islami, untuk mengukur kinerja keuangan dan kinerja sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tata kelola yang efektif untuk melindungi kepentingan dan hak *stakeholder* dan meningkatkan kinerja keuangan (Siswanti *et al*, 2017, hlm. 317). Didukung dengan pengelolaan yang baik atas sumber daya perbankan syariah terutama *intellectual*

capital akan meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar, sehingga meningkatkan kinerja BUS, seperti peningkatan pembayaran zakat akibat dari peningkatan *net asset* BUS yang menunjukkan kemampuan manajemen yang baik. Karena pada hakikatnya, akuntansi spiritualisme islam memposisikan sumber daya manusia sebagai pencipta laba yang diridhoi Allah (Triyuwono, dkk, 2016, hlm.244). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Sharia Governance dan Intellectual Capital terhadap Islamicity Performance Index di Bank Umum Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *Sharia Governance* berpengaruh positif terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS secara parsial?
2. Apakah *Intellectual Capital* (IC) berpengaruh positif terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS secara parsial?
3. Apakah *Sharia Governance* dan IC berpengaruh terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan *Sharia Governance* dan IC berpengaruh positif terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS secara parsial.
2. Untuk membuktikan pengaruh *Sharia Governance* dan IC terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pengaruh *Sharia Governance* dan IC terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS.
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *Sharia Governance* dan IC terhadap *Islamicity Performance Index* di BUS.
3. Bagi BUS diharapkan lebih sadar akan pentingnya meningkatkan aplikasi dan pengungkapan terhadap *sharia governance* dan IC.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi teori dengan menambah banyak variabel penelitian dan metode lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan terhadap BUS di Indonesia, mengenai hal apa saja yang harus diperbaiki dalam kinerja islaminya, seperti zakat dan pendistribusian yang adil pada semua pihak. Kemudian meningkatkan kualitas SDM sebagai *intellectual capital* dan tata kelola yang memegang prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya agar mendapatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan bagi OJK untuk membuat standar indeks baku atas kinerja islami dalam laporan keuangannya, karena indeks yang digunakan penulis masih dalam cakupan akademis.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan terdiri atas :
 - i. Latar Belakang Masalah
 - ii. Rumusan Masalah
 - iii. Maksud dan Tujuan Penelitian
 - iv. Manfaat Penelitian
 - v. Struktur Organisasi Skripsi
2. Bab II Kajian Pustaka terdiri atas :
 - i. Tinjauan Teoritis dengan sub bab :
 - a. *Resource Based Theory*
 - b. *Sharia Enterprise Theory*
 - c. *Sharia Governance*
 - d. *Intellectual Capital*
 - e. *Islamicity Performance Index*
 - f. Bank Umum Syariah Penelitian terdahulu
 - ii. Kerangka Pemikiran
 - iii. Hipotesis
3. Bab III Metode Penelitian
 - i. Objek Penelitian

- ii. Metode Penelitian dengan sub bab :
 - a. Desain Penelitian
 - b. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
 - c. Populasi dan Sampel Penelitian
 - d. Teknik Pengumpulan Data
 - e. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
- 4. Bab IV Temuan dan Pembahasan
- 5. Bab V Simpulan dan Rekomendasi

Tsara Azizah, 2019

*GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DI BANK
UMUM SYARIAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu